

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. G. Peters, et al., 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1984, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, et. al., 1988, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Negara (Contempt Of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Clazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publising, Malang.
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2004, *Makalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK*, Hotel Quality Makassar, Makassar.
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Persepsi Orang Bugis, Makassar Hukum, Negara dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung.
- A. Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan International*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2000, *Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,

- Arief Gosita, 1987, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- _____, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Bambang Sugono, et all., 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. BP Undip Cetakan Kedua, Semarang.
- _____, 1999, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Soedarso, 1989, *Korupsi Di Indonesia*, Bharatara, Jakarta.
- Berkley, E. George, 1969, *The Democratic Policeman*, Beacon Press Books, Toronto.
- Bertens, 1997, *Etika, Seri Filsafat Atmajaya: 15*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bryce Young, 1972, *Criminal Law, Codes and Caces*, Kingsport Press,
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Etiene Jaudel, 1989, *Assessment of The State of Human Right in Malaysia and Singapore From an International Perspective*. A

Report of conference held at the European Parliament, Brussel, 9 & 10 March.

Fahmiron, 2016, "*Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 (2), Fakultas Hukum Andalas.

Fockeman Andreae dalam Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gurnar Myrdal dalam Andi Hamsa, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.L.A. Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford University, New York.

H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.

Heri Tahir dan Ririn Nurfaathirany Heri, 2020, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok

Herdjito, 2014, "*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta*", Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Nurdjana, IGM, 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

J. E. Sahetapy 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.

_____, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung.

_____, 1999, *Bahan Kuliah Kemandirian Yudisial*, Program Pascasarjana Unair, Surabaya.

- Jimhy Assiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- John A. Gardiner dan David J. Olson, 1974, *Pencurian Kota: Bacaan tentang Korupsi di Perkotaan*. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, Amerika.
- Kurnia Dewi Anggraeny, 2016, "*Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*", *Jurnal Hukum Novelty*, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, 2006, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Press, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, "*Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*", Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimology*, Penerbit Jabatan, Jakarta.
- _____, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- L. B. Curzon, 1979, *Jurisprudence*, MacDonald and Evan,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, Jakarta.
- _____, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam System Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ke Lima*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2018, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25, No. 1, UII Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Miriam Budiarto, 1991. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- M. W. Kusuma dan Fitria Agustina, 2003, *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, INSIST Pers, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- M.L.H.C. Hulsman, 1994, *Sistem Peradilan Pidana, Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Penyadur, Soerdjono Dirdjosisworo, Rajawali, Jakarta.
- Mohammad Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Muchtar Lubis dan James C. Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung.
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Universitas Dipanegara, Semarang.
- _____, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Nadiatus Salama, 2010, "Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)", Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.

- Oemar Seno Adji, 1986, *Prasarana Pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta.
- Paul Sieghart, 1986, *The Lawful Rights of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, Oxford University Press, New York.
- Peter Mahmud MZ, 1999, *Luasnya Perlindungan Paten*, dalam *Jurnal Hukum No. 12. Vol. 6*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- P.J. Suwarno, 1999, *Tata Negara Baru, Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional*, Kanasius, Yogyakarta.
- Ramli Hutabarat, 1985, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- _____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rumadan Ismail, 2016, *“Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)”*, *Jurnal Mahkamah Agung RI*, Jakarta.
- S. Anwary, 2005, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, *Institute of Socioeconomics and Political Studies People Message (AMRA)*, Jakarta.
- Syed Hussein Alatas dalam Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Pers, Jakarta.

- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Sudibyo Triatmodjo, 1981, *Potret Kehidupan Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHP*, Alumni, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, 2002, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pustaka UI, Alumni, Bandung.
- Stuart S. Nagel, 1970, *Law and Social Change*, Sage Publication, Beverly Hills, London.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Tenth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, A/conf. 187/8, Vienna, 2000,
- W.J.S. Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 1986. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- W. Poespoprodjo, 1999, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- William III dan Mc. Shane dalam Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, Tentang Tindak Pidana Suap.

Putusan Mahkamah Agung RI, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun X No. 120. 1995,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999, Tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005, tentang sistem manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-111212005, Nomor: Kep-AIJ.A11212005, Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

INTERNET :

Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf

Hukumonline.com, <https://rn.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim?page=3>

William Rhodes, Ryan Kling, Jeremu Luallen dan Christina Dyou, Federal Sentencing Disparity: 2005-2012, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2021, <https://www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf>.